

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Hadadi Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.

Hadjon, Philipus M, 1997, *Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

HM Arief Muljadi, 2005, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi, 2013 , *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada Unity Press, Edisi VIII, Yogyakarta.

Oteng Sutina, 1987, *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritik Untuk Praktek Profesional*, Angkasa, Bandung.

Prayudi Atmosudirjo, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Adminstrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cet.ke-1, Bandung: Nuansa

Rusli Syarif, 1991, *Teknik Manajemen Latihan Dan Pembinaan*, Angkasa, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindopersada, Jakarta.

Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Persindo, Yogyakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sutedi, Adrian, SH.,MH, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, cet.ke-1, Jakarta: Sinar Grafika

Susanto, Herry dkk, 2003, *Otonomi Daerah dan Kompetensi Lokal Pikiran Serta Syaukani HR*, cet. Ke-1, Jakarta: Millenium Publisher

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-rundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
No.25/KEP/M.PAN/02/2004 tentang Pedoman Umum Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Pemerintah.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
26/KEP/M.PAN/02/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

C. Lain-lain

BKPM, 2018, "*Evaluasi Kemudahan Berusaha: Perizinan dan Pelaksanaan PP Nomor 24/2018*", Bahan presentasi dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional dengan tema Penataan Regulasi Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka

Hukumonline. “Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bcc0df105bb5/dinilai-tabrak-aturan-sana-sini--pp-oss-harus-direvisi>, diakses 7 Oktober 2019

Monika Suhayati, “Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Submission System*)”, *Majalah Info Singkat*, Vol. X, No.23/I/Puslit/Desember/2018 h.1

“Perizinan *Offline* Sulit Dihindari”, *Suara Pembaruan*, 19 November 2018, h. 2.

“Penerapan OSS v.1.1 dimulai 1 Januari 2020, <https://smartlegal.id/pendirian-usaha/registrasi-oss/2019/12/27/penerapan-oss-v-1-1-dimulai-1-januari-2020/>, diakses 29 Desember 2019.

Wartakota.com, “Dikeluhkan Masih Membingungkan, Online Single Submission (OSS) Terus Dikembangkan”, <http://wartakota.tribunnews.com/2018/11/23/dikeluhkan-masih-membingungkan-online-single-submission-oss-terus-dikembangkan>, diakses 7 Oktober 2019.